

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- _____, 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- _____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, : Jilid I*, Jakarta. Konstitusi Press.
- _____, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Pers.
- _____, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Keadilan*, Jakarta, ELSAM.
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.
- Azhary, H.M. Tahir, 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bogor, Kencana.
- Budiarjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Daud Busroh, Abu. 2001. *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Jakarta. Bina Aksara.
- Djohansyah, J, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, 2008, Jakarta: Kesaint Blanc.
- Fatwa. A.M. 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kompas.
- Firmansyah dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, Jakarta, KRHN.
- Gautama, Sudargo, 2008, *Pengertian tentang negara hukum, dalam Muhtadi .Pengawasan Hakim Indonesia*, universitas andalas.
- Hamidi, Jazim dkk, 2008, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta, Total Media.

- Hr, Ridwan. 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Lutfi, Mustafa dan Lutfi J Kurniawan, 2011, *Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang, Setara Press.
- Mahfud MD, Moh, 2000. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mahmud, Peter.2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama Cetakan ke-4.
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Akumni.
- Projudikoro, Wirjono, 1989, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta. Dian Rakyat.
- Phillips, O. Hood, 1987 *Constitutional and Administrative Law*. 7th ed. London: Sweet and Maxwell.
- Raharjo, Satjipto,2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MK.
- Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia,
- Soemanteri M, Sri, 1993, *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan.
- _____, 1986, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung, Alumni.
- Suny, Ismail, 1978, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta, Aksara Baru.
- Surowidjojo, Arief T, 2004, *Pembaharuan Hukum : Kumpulan Pemikiran Alumni FHUI*, Jakarta, Iluni-FHUI.
- Tim Penyunting Saafroedin Bahar, Ananda B Kusuma, Nannie. 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, Sekretariat Negara: Jakarta.
- Yasir, Armen, 2007, *Hukum Perundang-undangan*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Soekanto, Sarjono dan Sri Madmuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Kamus

- Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Blacks law Dictionary, Seven edition (USA: West group, 1999),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga. Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Sudarsono. *Kamus Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1992
- The Oxford English Dictionary, Second Edition Volume VIII, Claarendon Press. Oxford 1989*
- Tim Penyunting Saafroedin Bahar, Ananda B Kusuma, Nannie. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Sekretariat Negara: Jakarta, 1995*

Jurnal Ilmiah

- Bagir Manan, *Mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman*, Jurnal Keadilan, vol 2, No 6, Tahun 2002
- M Iwan Satriawan , *Jurnal Konstitusi: Paradigma Baru Lembaga Negara*, Jakarta: MKRI, 2011
- Zulkarnain, rildlwan, *Jurnal Konstitusi: kompetensi hakim konstitusi dalam penafsiran konstitusi*, MKRI, 2011

Peraturan Perundang-undangan

- Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang nomor 19 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan. LNRI Nomor Tahun 1948.
- Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. LNRI Nomor 107 Tahun 1964. TLNRI Nomor 2699
- Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. LNRI Nomor 74 Tahun 1970. TLNRI Nomor 2951
- Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. LNRI Nomor 147 Tahun 1999 TLNRI Nomor 3879
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. LNRI Nomor 8 Tahun 2004 TLNRI Nomor 4358

Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. LNRI Nomor 34 Tahun 2004 TLNRI Nomor 4370

Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. LNRI Nomor 35 Tahun 2004 TLNRI Nomor 4380

Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. LNRI Nomor 22 Tahun 2006 TLNRI Nomor 4611

Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. LNRI Nomor 3 Tahun 2009 TLNRI Nomor 4958

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. LNRI Nomor 157 Tahun 2009 TLNRI Nomor 5076

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. LNRI Nomor 70 Tahun 2011 TLNRI Nomor 5226

Website

http://eprints.ums.ac.id/350/1/6._aidul_fiticiada.pdf. Diunduh pada tanggal 13 Mei 2012, pukul 19:57 wib

<http://kanekzoke.blogspot.com> Diunduh pada tanggal 7 Oktober 2012 Pukul 00:27 Wib

<http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296215fd6b97e49f56325e486ef24291648c>. Diunduh pada tanggal 18 Mei 2012, pukul 08:39 wib

http://pshk.law.uii.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=69 diunduh pada tanggal 5 Desember 2012 pukul 02:00 Wib

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0404/17/kha2.htm> diunduh pada tanggal 12 desember 2012 pukul 02.00 wib

Surat Kabar

Abdul hakim G Nusantara, “*MK: Perspektif Politik dan Hukum*”, Harian Kompas edisi 24 September 2002

A Ahsin Thohari, *Demokrasi sekaligus Nomokrasi*, Harian Kompas edisi Jumat 7 November 2003

